

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI INDONESIA
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020)**

THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUNDS, AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS ON CAPITAL EXPENDITURE IN INDONESIA

(Case Study on Provincial Government in Indonesia Year 2019-2020)

Hanjelin Novianti¹, Sri Rahayu²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

noviarti@student.telkomuniversity.ac.id¹, sriahayu@telkomuniversity.ac.id²

ABSTRAK

Pada tahun 2020 banyak negara yang sedang terjadi pandemi *COVID-19* salah satunya Indonesia, perkembangan penyebaran *COVID-19* yang sangat cepat mengakibatkan penurunan pendapatan negara, di Indonesia terjadi adanya pemotongan APBD pada setiap daerah sehingga berpengaruh pada belanja modal dimana belanja modal tidak terealisasi dengan baik maka mempengaruhi infrastruktur tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Indonesia studi kasus pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2019-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Berdasarkan Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan secara parsial, menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

ABSTRACT

In 2020 many countries are experiencing a COVID-19 pandemic, one of which is Indonesia, the rapid development of the spread of COVID-19 has resulted in a decrease in state income, in Indonesia there is a reduction in the regional budget for each region so that it affects capital expenditures where capital expenditures are not realized properly. affecting the infrastructure is not running well.

This study aims to determine the effect of regional original income, general allocation funds, special allocation funds on capital expenditures in Indonesia, a case study of provincial government in Indonesia in 2019-2020. The data used in this study were obtained from the Budget Realization Report obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance.

Based on the test results show that simultaneously the variables of local revenue, general allocation funds, special allocation funds have a significant effect on capital expenditures. While partially, it shows the results that local original income and general allocation funds have no effect on capital expenditure, special allocation funds affect capital expenditure.

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

1. Pendahuluan

Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 ayat 8^[13] tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran pendapatan daerah, merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah (Indonesia) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) yang disetujui oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah untuk mengurangi kesenjangan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan dependensi terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik serta kebutuhan masyarakat di suatu daerah (Muhammad Syukuri 2019)^[4]. Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan dengan

memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintahan, potensi dan keanekaragaman daerah memberikan wewenang seluas-luasnya kepada daerah dengan pemberian hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah sendiri menganjurkan kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* dengan cara mengurangi atau menghentikan aktivitas untuk sementara waktu dengan begitu dapat mengurangi penyebaran COVID-19, namun berdampak pada beberapa sektor seperti sektor pariwisata, transportasi, manufaktur dan sektor lainnya yang berakibat penurunan perekonomian selama tahun 2020, penurunan pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada pendapatan negara dimana pendapatan negara sendiri berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat, sedangkan terjadi peningkatan belanja pemerintah yaitu pada bidang kesehatan serta sosial. Di Indonesia sendiri karena adanya masalah COVID-19 yang menyebabkan beberapa dampak seperti adanya pengurangan biaya APBD setiap daerah yang ada di Indonesia, (Kemenpan, 2020), dengan adanya pengurangan APBD maka berpengaruh pada belanja modal dimana belanja modal tidak terealisasi dengan baik maka mempengaruhi infrastruktur tidak berjalan dengan baik, yaitu terhambatnya pembangunan pada setiap daerah. Pada tahun 2019 belanja modal sebesar 218.913.807.436.983 yang berarti lebih besar dari pada tahun 2020 yaitu Rp 146.724.537.884.361, dikarenakan pada tahun 2020 adanya pemotongan belanja modal yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang bersumberkan dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, yang dipergunakan untuk keperluan daerah yang bersangkutan untuk membiayai kegiatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Pendapatan asli daerah berperan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana PAD menjadi sumber utama pendapatan suatu daerah, sebagai sumber dari pendapatan maka PAD harus digunakan sebaik mungkin dan dialokasikan sebanyak mungkin untuk alokasi belanja modal, hal ini memiliki tujuan agar pembangunan pada daerah berkembang dengan pesat dan bisa memicu pertumbuhan ekonomi, Rizal (2017) ^[9]. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal Muhammad Syukuri (2019) ^[4]. Sedangkan menurut (Ayem and Pratama 2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal ^[1].

Dana alokasi umum. Menurut UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang memiliki tujuan yang dialokasikan untuk kemampuan antar daerah untuk pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana alokasi umum terbagi menjadi: DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota. Dana alokasi umum merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah (Muhammad Syukuri 2019) ^[4]. Dalam implikasinya DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diberikan untuk meningkatkan pelayanan publik maka dari itu DAU dititikberatkan pada belanja modal. Dari hasil penelitian Rachim (2019) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, ^[8] sedangkan menurut Muhammad Syukuri (2019) pengaruh dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal ^[4].

Dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus menurut UU No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah dana yang berperan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan suatu daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diberikan pada daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pada daerah melalui pembangunan di daerah. Berdasarkan pengertian tentang DAK diatas maka DAK harus dititikberatkan terhadap Belanja modal untuk pemerintah daerah agar bisa melakukan pembangunan yang sesuai dengan prioritas nasional, misalnya seperti pada daerah terpencil dan tertinggal. Berdasarkan penelitian menurut penelitian Permatasari & Mildawati (2016) menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap Belanja modal pada kabupaten/kota di pulau Jawa, sedangkan menurut Muhammad Syukuri (2019), menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan ^[4].

2. Dasar Teori dan Metodologi

2.1 Dasar Teori

A. Pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 ^[12] tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah biasanya disebut dengan PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan undang-undang.

H2: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

B. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 ^[14] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dimana Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan kepada setiap daerah yang memiliki tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU)

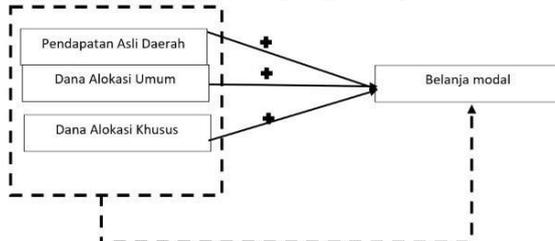
yang ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

H3: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal

C. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014^[14] tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan dari daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

H4: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal



Keterangan:

—————▶ : Pengaruh Parsial
 - - - - -▶ : Pengaruh Simultan

2.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi data panel dengan menggunakan Software Eviews 11. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian teknik *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi dengan tahun penelitian selama 2 tahun dari tahun 2019-2020. Persamaan analisis model data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1i,t} + \beta_2 X_{2i,t} + \beta_3 X_{3i,t} + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

PAD_{i,t} = Pendapatan asli daerah i ke t

DAU_{i,t} = Dana alokasi umum i ke t

DAK_{i,t} = Dana alokasi khusus i ke t

α = Konstanta

ε = Kesalahan/error

β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi masing-masing variabel

3. Pembahasan

3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	BM	PAD	DAU	DAK
Mean	5.464.194.842.502	7.441.833.090.902	12.375.704.444.862	5.178.129.000.230
Max.	21.199.933.351.888	44.150.909.128.074	41.525.396.739.080	20.940.428.051.513
Min.	986.402.454.776	766.492.645.937	3.666.433.801.000	1.045.329.608.160
Std Dev	4.263.768.575.934	10.342.374.994.581	9.690.706.847.213	5.066.080.162.828
N	60	60	60	60

Sumber: Data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan Pengujian Analisis Deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:

- A. Belanja Modal (BM) memiliki rata-rata sebesar Rp5.464.194.842.502 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp4.263.768.575.934. Hal tersebut menunjukkan bahwa data belanja modal pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia bersifat tidak bervariasi atau berkelompok. Belanja Modal memiliki nilai maksimum sebesar Rp21.199.933.351.888 yang dimiliki oleh provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimal variabel Belanja Modal sebesar Rp986.402.454.776 yang dimiliki oleh provinsi Gorontalo pada tahun 2020.
- B. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata sebesar Rp7.441.833.090.902 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp10.342.374.994.581. Hal tersebut menunjukkan bahwa data Pendapatan Asli Daerah pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia bersifat bervariasi atau tidak berkelompok. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp44.150.909.128.074 yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimal variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp766.492.645.937

yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020.

- C. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki rata-rata sebesar Rp12.375.704.444.862 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp9.690.706.847.213. Hal tersebut menunjukkan bahwa data Dana Alokasi Umum pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia bersifat tidak bervariasi atau berkelompok. Dana Alokasi Umum memiliki nilai maksimum sebesar Rp41.525.396.739.080 yang dimiliki oleh provinsi Jawa Timur pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimal variabel Dana Alokasi Umum sebesar Rp3.666.433.801.000 yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020.
- D. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki rata-rata sebesar Rp5.178.129.000.230 dengan nilai standar deviasi sebesar Rp5.066.080.162.828. Hal tersebut menunjukkan bahwa data Dana Alokasi Khusus pada seluruh provinsi yang ada di Indonesia bersifat tidak bervariasi atau berkelompok. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai maksimum sebesar Rp20.940.428.051.513 yang dimiliki oleh provinsi Barat pada tahun 2019. Sedangkan nilai minimal variabel Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.045.329.608.160 yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019.

3.2 Analisis Regresi Data Panel

A. Uji Multikolinieritas

Tabel 3.2 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.788320	0.445327
X2	0.788320	1.000000	0.476155
X3	0.445327	0.476155	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 11 (2021)

Berdasarkan tabel 3.2 hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar setiap variabel independen yang diuji $< 0,8$ maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

B. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 04/05/21 Time: 13:29
Sample: 2019 2020
Periods included: 2
Cross-sections included: 30
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.212133	0.164056	1.293052	0.2013
X1	-0.010100	0.090229	-0.111938	0.9113
X2	-0.102308	0.238218	-0.429473	0.6692
X3	-0.021780	0.067703	-0.321693	0.7489

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 11 (2021)

Berdasarkan tabel 3.3 hasil uji heteroskedastisitas pada variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi heteroskedastisitas.

3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

A. Uji Chow

Tabel 3.4 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.485600	(29,27)	0.1522
Cross-section Chi-square	57.230092	29	0.0013

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 11 (2021)

Berdasarkan tabel 3.4 Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas dari *cross section Chi-square* sebesar $0,1522 > 0,05$. Berdasarkan data hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, sehingga pada penelitian ini model regresi data panel yang digunakan adalah *common effect model* lebih baik dari pada *fixed effect model*.

B. Uji Hausman

Tabel 3.5 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.712712	3	0.0033

Sumber: Hasil Pengolahan data Eviews 11 (2021)

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat nilai dari probabilitas dari Cross-section random sebesar $0,0033 < 0,05$. Berdasarkan hasil data dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, sehingga pada penelitian ini model regresi data panel dengan *fixed effect model* lebih baik digunakan dari pada model regresi data panel random effect model.

C. Uji Langrange Multiplier

Tabel 3.6 Hasil Uji Langrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	0.199408 (0.6552)	0.079395 (0.7781)	0.278803 (0.5975)
Honda	-0.446551 (0.6724)	0.281771 (0.3891)	-0.116517 (0.5464)
King-Wu	-0.446551 (0.6724)	0.281771 (0.3891)	0.195507 (0.4225)
Standardized Honda	-0.297089 (0.6168)	1.058242 (0.1450)	-5.212660 (1.0000)
Standardized King-Wu	-0.297089 (0.6168)	1.058242 (0.1450)	-1.812992 (0.9651)
Gourieroux, et al.	--	--	0.079395 (0.6293)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 11 (2021)

Tabel 3.6 menunjukkan hasil dari uji langrange multiplier maka diperoleh nilai Probabilitas Breuch-Pagan Cross-section sebesar $0,5975 > 0,05$. Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan bahwa H_0 diterima sehingga pada penelitian ini regresi data panel yang digunakan adalah common effect model lebih baik daripada fixed effect model.

3.4 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan *Common Effect*. Tabel 3.7 merupakan hasil uji menggunakan common Effect.

Tabel 3.7 Hasil Pengujian Signifikansi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.384164	0.720884	1.920092	0.0655
X1	0.152749	0.174949	0.873105	0.3903
X2	-1.053866	0.831332	-1.267684	0.2157
X3	0.304934	0.137521	2.217371	0.0352

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.068411	R-squared	0.824729
Mean dependent var	0.795000	Adjusted R-squared	0.617001
S.D. dependent var	0.164785	S.E. of regression	0.101981
Akaike info criterion	-1.426575	Sum squared resid	0.280802
Schwarz criterion	-0.274685	Log likelihood	75.79724
Hannan-Quinn criter.	-0.976007	F-statistic	3.970226
Durbin-Watson stat	3.870968	Prob(F-statistic)	0.000236

Sumber: Hasil Pengolahan Data Eviews 11 (2021)

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi common effect pada tabel 3.7 dapat dirumuskan dengan persamaan regresi data panel, sebagai berikut:

$$BM = 1,384164 + 0,152749 X1 - 1,053866 X2 + 0,304934 X3$$

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan Tabel 3.7 diatas, dapat diketahui nilai Adjusted R-Square pada model pada penelitian ini dengan nilai probabilitas (f-statistic) sebesar 0,617001 atau sebesar 61,70% yang berarti bahwa variabel

independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mampu menjelaskan variabel dependen belanja modal sebesar 61,70% dan selebihnya dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini.

3.5.2 Uji simultan (Uji F)

Berdasarkan Tabel 3.7 diperoleh bahwa nilai Probability (F-statistic) sebesar $0,000236 < 0,05$, berarti probabilitas pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikansi secara simultan terhadap belanja modal.

3.5.3 Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan Tabel 3.7 didapatkan hasil sebagai berikut:

- Nilai probabilitas pendapatan asli daerah sebesar 0,3903. Nilai tersebut menunjukkan $0,3903 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak, sehingga pendapatan asli daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- Nilai probabilitas dana alokasi umum sebesar 0,2157. Nilai tersebut menunjukkan $0,2157 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak, sehingga dana alokasi umum secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- Nilai probabilitas dana alokasi khusus sebesar 0,0352. Nilai tersebut menunjukkan $0,0352 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{03} diterima, sehingga dana alokasi khusus secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3.6 Pembahasan Hasil Penelitian

3.6.1 Pengaruh Pendapatan asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4.11 diketahui bahwa nilai dari probabilitas yang diperoleh dari variabel independen yaitu pendapatan asli daerah sebesar 0,3903 yang dimana nilai signifikan lebih dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa H_{01} ditolak, maka ketika suatu pendapatan asli daerah meningkat tidak berarti belanja modal juga meningkat sehingga pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Indonesia tahun 2019-2020. Hal ini bisa dikarenakan adanya nilai pendapatan asli daerah yang rentannya sangat jauh, yaitu antara provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Barat sehingga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja modal.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Pratama, 2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal^[1].

3.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4.11 diketahui bahwa nilai dari probabilitas yang diperoleh dari variabel independen yaitu dana alokasi umum sebesar 0,2157 yang dimana nilai signifikan lebih dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa H_{02} ditolak, sehingga dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Indonesia tahun 2019-2020. Hal ini dikarenakan penggunaan dari dana alokasi umum lebih banyak untuk pendanaan belanja pegawai dan belanja rutin, sehingga dana untuk pembuatan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur masih menggunakan belanja modal sehingga membuat belanja modal masih kurang efisien atau kurang dimaksimalkan yang dimana hasil statistik deskriptif nilai dari rata-rata dana alokasi umum yaitu Rp 12.237.704.444.862 lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata belanja modal sebesar Rp 5.464.194.842.502.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Syukuri, 2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal^[4].

3.6.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel 4.11 diketahui bahwa nilai dari probabilitas yang diperoleh dari variabel independen yaitu dana alokasi khusus sebesar 0,0352 yang dimana nilai signifikan kurang dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa H_{03} diterima, sehingga dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal di Indonesia tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini memberikan adanya indikasi bahwa perilaku belanja modal dipengaruhi dari sumber penerimaan dana alokasi khusus. Setiap penggunaan dana alokasi khusus telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak bisa membelanjakannya untuk kebutuhan lain.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Permatasari & Mildawati, 2016) bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

4. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap belanja modal secara simultan maupun secara parsial selama masa pandemi COVID-19. Sampel dari penelitian sebanyak 60 sampel yang digunakan dari 34 provinsi selama dua tahun penelitian yaitu tahun 2019 dan 2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Indonesia.

Berdasarkan uji signifikan simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan sebesar 61,70% terhadap belanja modal pada provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2020 dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Berdasarkan pengujian parsial pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pada Provinsi di Indonesia pada tahun 2019-2020.

REFERENSI

- [1] Ayam, Sri, and Dessy Dyah Pratama. (2018). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016." *Akuntansi Dewantara* 2 (2): 169–82.
- [2] Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi. (2020). "Presiden: Pangkas Anggaran Nonprioritas Dan Alihkan Pada Penanganan Covid-19." 2020.
- [3] Febrina, Eva, Sri Rahayu, and Vaya Juliana Dillak. (2016). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011- The Influence Of Economic Growth And Original Local Government (A Case Study)" 3 (2): 1649–55.
- [4] Muhammad Syukuri, Hinaya. (2019). "Jemma | Jurnal of Economic ,," *Jemma Jurnal of Economic, Management and Accounting* 2 (4): 45–52.
- [5] Mutiah, and Ratna Mappanyuki. (2015). "The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Government in Indonesia)." *Research Journal of Finance and Accounting* 6 (9): 14–22.
- [6] Pratiwi, Nissa Anggit. (2019). "JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)." *Perlakuan Akuntansi Produk Rusak Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi (Studi Kasus Penentuan Biaya Produksi Di Kawasan Sentra Industri Sepatu Cibaduyut Kota Bandung)* 3 (c): 01.
- [7] Putu, Ni, Santi Suryantini, Ica Rika Candraningrat, Ni Made, and Wulandari Kusumadewi. (2017). "The Influence of Dau (General Allocation Fund) and Dak (Special Allocation Fund) on Capital Expenditure of Bali Province." *Economics & Business Solutions Journal* 1 (2): 1–9.
- [8] Rachim, Intan Savirra Aidah, Ratna Wijayanti D.P, and Noviansyah Rizal. (2019). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2015-2017". *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2 (July 2019): 177–82.
- [9] Rizal, Yani. (2017). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis* 8 (1): 634–45.
- [10] Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). "Research Methods for Business: A Skill Building Approach." In . John Wiley & Sons.
- [11] Surakhman, A, Abid Djazuli, and Choiriyah. (2019). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang." *Kolegial* 7 (2): 150–66.
- [12] Undang-undang No.33 tahun 2004
- [13] Undang-undang No.17 Tahun 2003
- [14] Undang-undang No.27 tahun 2014